



Bangli Raih Predikat Opini WTP untuk Pertama Kali

USAHA jajaran Pemkab Bangli di bawah kepemimpinan Bupati I Made Gianyar dan Wabub Sang Nyoman Sedana Arta membuah hasil yang membanggakan. Jumat (2/6), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP), Kabupaten Bangli meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan LKP yang dilakukan oleh BPK meliputi tiga bagian, yaitu LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016, LHP atas sistem Pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016, dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016.

Bertempat di ruang rapat Bagian Umum Sekda Bangli, Bupati Bangli, I Made Gianyar, mengaku bangga serta mengapresiasi atas prestasi yang dapat diraih ini. Kata dia, ini merupakan pertama kalinya Kabupaten Bangli meraih predikat WTP.

"Terimakasih saya ucapkan kepada para pegawai, yang sudah bekerja siang dan malam sebagai bentuk rasa jengah kita bersama, sehingga untuk pertama kalinya kita bisa meraih predikat WTP," ucap Gianyar sepulang menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Meski baru pertama kali, Gianyar menuturkan, peraih prestasi WTP ini adalah murni karena kerja keras para pegawai dan keteguhan pihaknya untuk tidak melakukan cara-cara instan. Selain itu, menyikapi banyaknya prestasi WTP yang diperoleh pasca tertangkapnya oknum BPK RI oleh



BUPATI Bangli, Made Gianyar didampingi Wabub Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata dan Sekda IB Gede Giri Putra, saat acara press convenerence di Ruang rapat Setda Bangli, Jumat (2/6).

KPK, Gianyar menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan membuat pencapaian Pemkab Bangli mendapat image buruk di masyarakat.

"Kita mendapat WTP karena kerja keras. Jangan merasa kecil hati, karena adanya oknum BPK yang tertangkap. Sebab, dalam satu ketempat pastilah ada orang jahat, namun banyak juga orang yang baik. Tertangkapnya mereka adalah salah satu cara pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Ngakan Kutha Parwata mengharapkan dengan predikat WTP yang diperoleh saat ini tidak membuat jemawa. Menurut dia, mempertahankan akan lebih sulit daripada mendapatkan. "Predikat yang diperoleh sekarang menjadi awal agar kinerja kita menjadi lebih baik lagi. Selain itu, kekurangan-kekurangan yang masih ada, kami harapkan segera diperbaiki," ungkap Kutha Parwata.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dinyatakan seluruh Kabupaten/Kota di

Bali memperoleh WTP. Meski demikian, tanpa mengurangi upaya yang telah dicapai Pemda tersebut, BPK RI secara umum masih menemukan adanya kelemahan System Pengendalian Internal (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Untuk SPI salah satunya menyangkut, penatausahaan aset yang belum tertib, serta masih terdapat pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai.

Untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, diantaranya terdapat kelebihan pembayaran pajak gaji dan tunjangan PNS. Selain itu terdapat pengelolaan belanja yang tidak sesuai ketentuan berupa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja transfer bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (adv/mer)

Edisi : Sabtu 3 Juni 2016

Hal : 4



Tiga Kali Berturut – Turut, Gianyar Raih Predikat Opini WTP

PEMERINTAH Kabupaten Gianyar kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog, Jumat, (2/6) di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan LHP diberikan kepada para Ketua DPRD dan Bupati/Walikota se – Provinsi Bali, dimana seluruhnya memperoleh WTP. Dengan raihan ini, Kabupaten Gianyar secara berturut – turut mendapat predikat WTP dimana pada LKPD Tahun Anggaran 2014 dan 2015 juga mendapat WTP dari BPK.

Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan. Antara lain, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat Opini Pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam Kerangka



Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gianyar adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/ Kota, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016, seluruhnya memperoleh Opini Tanpa Pengecualian,” kata Yulindra Tri Kusumo Nugroho.

Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, bahwa predikat Opini WTP yang berhasil diraih Kabupaten Gianyar, merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Dengan raihan WTP ini, diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

“Dengan berturut – turut meraih WTP kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi menjadikannya sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depannya. Sehingga Gianyar menjadi lebih baik lagi,” terang Mahayastra.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Togog, mengaku bangga atas pencapaian yang di raih Pemkab Gianyar. Namun, dirinya berharap dengan predikat opini WTP tiga kali berturut – turut ini membuat jajaran di lingkungan Pemkab Gianyar terlena. Tetapi dengan apa yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Dengan raihan predikat opini WTP, kinerja Pemkab Gianyar dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan tata pemerintahan dapat terus ditingkatkan,” kata Made Togog. (adv)

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2016

Hal : 6



Kepala BPK Persilakan Cek ke Auditor

- 9 Kabupaten dan Kota di Bali Dapat WTP
- Bupati Artha Pastikan Tak Ada Jual Beli

DENPASAR, TRIBUN BALI - Kepala BPK Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho menegaskan tak ada suap atau jual beli dalam

penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dia mempersilakan jika ragu dengan penilaian itu

dipersilakan cek ke auditor masing-masing.

Senyum bahagia para bupati/walikota jelas terpampang dari raut wajah para pimpinan daerah ini ketika berfoto bersama dan diberikan piagam penghargaan oleh Kepala BPK Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho. Apakah ada suap menyuap dalam pemberian opini WTP? Nugroho memastikan pihaknya memberikan penilaian WTP ke sembilan kabupaten/kota se-Bali berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

"*Isyaallah, Astungkara* di Perwakilan Bali enggak ada seperti itu. *Insyaallah* enggak ada kejadian itu, tidak ada jual beli, kami profesional, yakin kalau

Temuan soal Honor Tak Berpengaruh

KEPALA BPK Perwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho mengatakan, tetap ada catatan kecil. Nugroho menyebut beberapa catatan di antaranya pengelolaan aset masih ada masalah tetapi tidak signifikan. Selain itu ada beberapa belanja mengenai honor, tetapi tidak signifikan dan tidak ada yang merugikan keuangan negara, sehingga masih layak mendapatkan WTP.

Mengenai kabupaten/kota mana saja yang mendapatkan temuan paling banyak, ia mengaku tidak hafal secara pasti. "Aset misalnya pengamanannya, tanah belum ada pelangnya, kemudian belum semua tanah tersertifikat. Rata-rata semua temuannya sama paling hanya lima atau enam temuan enggak terlalu banyak. Enggak ada yang besar, maka kami berani memberikan WTP," ujarnya. (agw)

BERSAMBUNG ● HAL 7

Edisi : Sabtu 3 Juni 2017
Hal : 8



Sambungan, hal 8

Kepala BPK Persilakan...

• DARI HALAMAN 8

enggak percaya tanya auditor dan pemda," ujar Nugroho dikonfirmasi *Tribun Bali* selepas pertemuan di kantor BPK RI Perwakilan Bali, Jumat (2/6).

Pemberian opini WTP ini didasarkan pada beberapa hal yakni kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan standar, kepatuhan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dari masing-masing komponen dilakukan uji secara keseluruhan sehingga BPK RI layak memberikan laporan keuangan WTP untuk seluruh kabupaten/kota di Bali.

"Kami profesional, kemudian mekanismenya kami melalui pemeriksaan secara teliti dan akuntabel," ujarnya.

Mewakili bupati/walikota se-Bali, dalam sambutannya Bupati Jembrana, I Putu Artha berterima kasih kepada BPK atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPJ 2016 yang berdasarkan pada pengendalian internal. Kemudian juga kepatuhan perundang-undangan dan pemeriksaan keuangan.

"Saat ini kami bersama-sama mendapatkan opini keuangan. Kami bersama-sama meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Mewakili pemerintah kabupaten/kota, terima kasih kepada BPK telah memberikan koreksi dan pengawasan kepada pemerintah daerah," jelasnya.

Selepas pertemuan, Bupati Artha ketika disinggung terkait apakah ada bupati/wali kota yang jual beli opini WTP, ia mengaku tidak ada yang jual beli opini WTP dari pemerintah kabupaten/kota di Bali.

"Saya rasa kami enggak seperti itu, kami di Pemda enggak ada seperti itu, kalau di Bali yakin enggak ada jual beli. Kalau tempat lain saya enggak tahu. Kami enggak berani apa yang sudah digariskan aturan, kami enggak berani melanggar," jelas politisi PDIP.

Dikatakannya khusus di Jembrana memang beberapa masih mendapatkan temuan untuk ditindaklanjuti kembali seperti masalah aset. Aset ini beberapa masalah administrasi saja, karena peralihan ke-

wenangan dan peraturan. Ini berimbas pada beberapa aset yang dahulu aset pusat dikembalikan ke daerah, pegawai daerah diambil ke pusat. "Simpang siur ini maka administrasi belum pas. Tetapi kan enggak ada kerugian negara itu, mudah-mudahan 60 hari ke depan kami selesaikan rekomendasi BPK ini," jelasnya.

Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata sebagai perwakilan DPRD kabupaten/kota mengatakan, semua kabupaten/kota se-Bali sudah mendapatkan opini WTP, ini sebagai pelecut pengelolaan pemerintah, walaupun pihaknya selaku legislatif akan tetap mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebelumnya untuk LHP BPK laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tahun 2015, hanya delapan pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Bali yang memperoleh WTP. Sedangkan Pemkab Bangli memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tetapi untuk laporan keuangan tahun 2016 semua mendapatkan opini WTP. (agw)

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 8



Wawali Jaya Negara Terima Piagam WTP dan LHP TA 2016

■ Pemkot Pertahankan Predikat WTP Lima Kali Berturut-turut Dari BPK RI

HASIL pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan ini menjadi keberhasilan Pemkot Denpasar mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2012. Penyerahan piagam WTP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 dilakukan pada Jumat (2/6) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho diterima Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariyana Wandira di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Penyerahan LHP dilaksanakan secara bersamaan yang menghadirkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali yang dilanjutkan dengan pengumuman opini BPK atas hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho. "Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2016 pada sembilan kabupaten/kota yang seluruhnya memperoleh WTP," ujar Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho usai menyerahkan LHP kepada masing-masing kepala daerah dan pimpinan DPRD. Lebih lanjut dikatakan LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian, yakni LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2016 yang memuat opini pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan. Demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, sesuai ketentuan dalam pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 diharapkan seluruh kabupaten/kota dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.

Wakil Walikota I GN Jaya Negara menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI beserta jajarannya yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan. Sehingga pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota



WAKIL Walikota I GN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariyana Wandira menerima piagam WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, Jumat (2/6) di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Karenanya kedepan Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon bimbingan kepada BPK RI dan jajarannya untuk terus melakukan pembinaan, sehingga keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dikatakan dengan keberhasilan meraih opini WTP ini dapat menjadikan semangat bagi aparatur di Pemkot Denpasar sehingga nantinya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Wayan Mariyana Wandira mengatakan DPRD Kota Denpasar sebagai legislator bersama Pemkot Denpasar dengan prestasi WTP yang telah diraih berturut-turut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Sehingga WTP tidak semata-merta sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lagi mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemkot Denpasar. "Ini bentuk keseriusan Pemkot Denpasar dengan hasil WTP sebagai prestasi bagi Kota Denpasar dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. (adv)

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 8